

TAJUK RENCANA

Pemilu Lebih Rasional dan Berakhlak

MENGAWALI kerja tahun politik, 2023, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipimpin ketuanya, Hasyim Asy'ari, bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU). Di mabes kedua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia itu, mereka ditemui langsung pimpinan tertingginya, Dr H Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) dan KH Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU, tentu bersama jajarannya.

Pasti banyak hal penting yang didapat dari para elite kedua ormas itu. Ketua PP Muhammadiyah yang mengatakan Pemilu 14 Februari 2024 merupakan harga mati, antara lain mengharapkan, selain pemilu luber jurdil dan pasti 5 tahun, juga ada suasana nyaman, aman, gembira dan berkualitas (proses hingga hasilnya). Gembira itu agar kita ketika masuk ke bilik suara tidak saling bersitegang, berhadapan hadapan tetapi nikmati sebagai sebuah kontestasi yang mengeluarga. Tidak membuat sesama komponen terpecah belah.

Hal senada disampaikan Ketua Umum PBNU, yang mengingatkan agar semua pihak tidak 'baper' (bawa perasaan) dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tidak pakai halalkan darahnya orang. Seharusnya penyelenggaraan pemilu, lebih rileks dalam mencari jalan masa depan bangsa yang lebih baik untuk semua orang. Perlu diwujudkan suatu tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak.

Rasional itu artinya tidak usah main sentimen-sentimen identitas dan tidak usah main sentimen primordial. Kalau kita menengok ke belakang, dalam Pemilu-pemilu sebelumnya memang belum mencerminkan keadaan-keadaan seperti yang diharapkan para petinggi NU dan Muhammadiyah itu. Bahkan bisa dibayangkan, Pemilu merupakan momentum konflik rutin lima tahunan. Sebab, perbedaan pilihan di masyarakat, bahkan di keluarga, masih dianggap masalah, jadi pertengkaran, baik secara lahir yang kelihatan maupun batin dengan diam-diam. Bahkan eksekusi Pilpres empat tahun lalu masih terasa sampai saat ini,

meski para elite politik yang berhadapan-hadapan saat itu sudah bersatu, sudah bersama-sama bekerja untuk bangsa dan negara, namun di kalangan bawah tampak masih belum legawa.

Pasti para pimpinan NU maupun Muhammadiyah menginginkan suasana-suasana yang tidak menegakkan itu tidak terjadi lagi dalam Pemilu 2024 maupun seterusnya, mulai dari proses sampai hasil. Juga tidak terjadi lagi dalam kontestasi lainnya, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa/lurah. Jadi, pesta demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak. Semua warga Indonesia, mulai dari para elite dan pendukungnya yang terlibat kontestasi sampai masyarakat umum, melakukan sesuatu yang rasional, memakai akal sehat dan menerangkan akhlakul karimah atau tatakrama yang mulia. Misalnya tidak saling menjelekkkan atau menjatuhkan.

Untuk itu memang perlu dilakukan edukasi secara masiv. Berbagai kalangan dari elite di pusat sampai bawah perlu terus menerus melakukan penyadaran dan pencerahan. Termasuk mereka yang terlibat kontestasi perlu diingatkan agar dalam meraih kemenangan dengan cara elegan, baik secara lahir maupun diam-diam. Jangan sampai saat di depan umum menyampaikan hal-hal bagus, positif, dan lainnya, tetapi di belakang layar punya buzzer-buzzer yang siap menjatuhkan lawan politiknya, misalnya dengan menyebar dokumen, rekaman, atau video lama maupun baru yang dimix atau diedit sedemikian rupa kemudian disebar melalui media sosial (Med-sos). Kalau ada masalah tidak justru 'digoreng', tetapi dicarikan solusi.

Kita semua berharap, tahun 2023 yang dianggap tahun politik dan diprediksi bakal panas, suasananya tetap adem ayam saja. Kita semua menjalankan proses pemilu secara aman dan nyaman. Masyarakat bisa tetap melakukan berbagai aktivitasnya dengan tenang. Dan akhirnya nanti Pemilu bisa menghasilkan pemimpin terbaik serta yang khal Bersama seluruh pendukungnya bisa menerima secara legawa. □d

Memahami Pendidikan Transformatif 2023

PERUBAHAN atau transformasi merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Selama tahun 2022, praksis pembelajaran kita mengalami perubahan di kelas/sekolah. Sebagai contoh, sebelum pandemi Covid-19, guru dan siswa bertatap muka di kelas. Saat pandemi Covid-19, guru dan siswa bertatap muka di kelas daring. Pascapandemi Covid-19, guru dan siswa bertatap muka secara bauran (blended) luring dan daring.

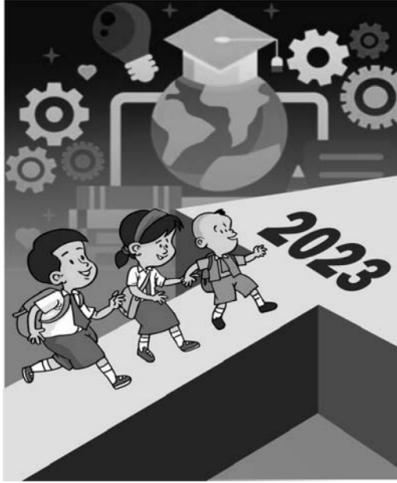
Terkait itu, perubahan tidak hanya terjadi pada praksis pembelajaran di kelas/sekolah. Perubahan juga terjadi pada sejumlah aspek yang melibatkan guru, kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, dan masyarakat. Penulis mencatat ada tiga aspek. Pertama, aspek kurikulum. Tahun 2022 ialah tahun transisi kurikulum di sekolah, dari Kurikulum 2013 (K-13) ke Kurikulum Merdeka. Selama kurun waktu itu, terjadilah perubahan yang melibatkan pihak-pihak tadi.

Bukan Operator Kurikulum
Secara ideal, guru bukanlah seorang operator kurikulum (Lie, 2005). Lebih dari itu, guru harusnya memosisikan diri sebagai sosok yang membawa spirit perubahan di kelas. Spirit perubahan itu dapat diwujudkan, salah satunya ialah melalui pembelajaran berbasis proyek. Melalui model itu, guru dapat membimbing, memfasilitasi, dan menginspirasi para siswa agar mereka dapat berinovasi menghasilkan karya/produk yang bermakna.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sejumlah guru mengaku masih bingung akan istilah tertentu. Misalnya, dalam K-13 dikenal rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sedangkan dalam Kurikulum Merdeka dikenal modul ajar. Perbedaan istilah itu berdampak dua hal. Di satu sisi, membingungkan bagi guru dan di lain sisi, memberikan kekeuasaan bagi guru. Dua dampak itu terjawab tatkala guru mendorong dirinya untuk belajar akan hal-hal baru. Kedua, aspek kebijakan. Dalam pro-

Sudaryanto

gram Merdeka Belajar, muncullah program Guru Penggerak (GP) dan pendampingan Sekolah Penggerak (SP) di berbagai daerah dan daerah 3T (terdepan, terbelakang, terluar). Program GP dan SP mendorong para guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk memutakhirkan kembali ilmu pembelajaran holistik dan praktik pembelajaran terpusat pada siswa secara rutin dan berkelanjutan. Setelah menempuh program GP sela-



KR-JOKO SANTOSO

ma 9 bulan, para guru dapat menginisiasi dua hal. Pertama, mendorong peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah. Kedua, membuka ruang positif dan ruang kolaboratif antara guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dua hal itu, suka atau tidak, berdampak terhadap kebijakan sekolah yang berfokus pada pembelajaran terpusat pada siswa.

Selaras dengan program GP, program SP memiliki banyak manfaat bagi sekolah. Pertama, peningkatan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Kedua, percepatan digitalisasi

sekolah. Ketiga, percepatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila. Keempat, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Kelima, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain. Keenam, pendampingan intensif untuk satuan pendidikan.

Masyarakat Proaktif

Ketiga, aspek masyarakat. Terkait program Merdeka Belajar, masyarakat proaktif dalam penguatan literasi anak, serta pencegahan dan penanganan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Penguatan literasi anak ditumbuhkan di rumah, sekolah, dan umum. Kegiatan Taman Pendidikan Alquran (TPA) diintegrasikan dengan kegiatan literasi. Sebagai contoh, pelaksanaan PPK Ormawa Rumah Literasi PBSI FKIP UAD di daerah Seyegan, Sleman.

Aksi pencegahan dan penanganan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual dilakukan melalui internalisasi nilai agama dari orang tua/guru kepada anak/siswa. Anak/siswa bertumbuh menjadi insan yang toleran terhadap perbedaan dan menyayangi sesama. Apapun perubahan kecil itu, kata Nadiem Makarim, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Semoga! □d

*) **Sudaryanto, MPd, Dosen PBSI FKIP UAD; Mahasiswa S-3 UNY; Pengurus Adobsi Pusat Periode 2019-2024**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

Destinasi Wisata Pascapencabutan PPKM

KEPUTUSAN pemerintah mencabut PPKM langsung disambut positif oleh semua pihak, khususnya dunia usaha lebih khusus lagi, usaha pariwisata. Pengumuman keputusan pencabutan PPKM yang disampaikan langsung Presiden Jokowi itu tentunya sudah mempertimbangkan banyak aspek, termasuk hasil evaluasi penanganan Covid-19 selama dua tahun.

Sektor pariwisata merupakan bisnis yang cukup menderita atau hampir hancur diterpa Covid-19. Cukup banyak hotel, restoran, biro perjalanan dan destinasi wisata ditutup, dengan banyak korban PHK. Bisnis usaha pariwisata boleh dibilang sudah kenyang dihantam badai krisis, mulai dari aksi teror bom, bencana alam, hingga pandemi Covid-19. Ibaratnya urat penderitaan para pelaku bisnis pariwisata sudah putus, karena berkali kali jatuh bangun. Kini, dengan pembebasan beraktivitas tentunya menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis pariwisata untuk menata diri, mengembangkan inovasi produk dan memperkuat keandalan sumber daya manusia yang ada di masing masing usaha pariwisata tersebut.

Bangkit Perlahan

Sebenarnya sudah sejak satu tahun yang lalu, usaha pariwisata mulai bangkit perlahan namun pasti. Kendati masih dalam bingkai kebijakan PPKM dan kebijakan larangan kunjungan wisata dari banyak negara. Sebagaimana pernah diungkapkan Menparekraf Sandiaga Uno bahwa dengan pencabutan PPKM ini, Indonesia bisa jadi barometer kebangkitan pariwisata.

Pernyataan Menparekraf ini layak digarisbawahi dengan bijak. Artinya jangan lantas terjadi euphoria yang kemudian mengabaikan protokol kesehatan yang selama ini sudah berhasil dijalankan di Indonesia dan diakui dunia khususnya WHO. Kita harus tetap ingat dan waspada bahwa Covid masih ada dan varian

Ronny Sugiantoro

varian baru terus bermunculan. Bahkan China sampai sekarang pun masih bergelut dan berjuang dengan meningkatnya pasien yang terkena Covid varian baru tersebut.

Kita mendukung komitmen pemerintah untuk memacu beberapa destinasi unggulan yang tentunya juga diikuti kucuran dana yang tidak sedikit. Namun demikian juga jangan melupakan destinasi destinasi wisata lokal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sejalan dengan ajakan pemerintah yang didengarkan Presiden Jokowi untuk mengutamakan mengunjungi destinasi wisata dalam negeri, maka upaya pembebanan harus segera dilakukan. Sehingga destinasi wisata dalam negeri memiliki *competitive advantage*. Dampaknya, masyarakat tidak berbondong-bondong berwisata ke luar negeri.

Destinasi Baru

Kita mengamati dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini makin banyak bermunculan destinasi wisata baru yang didominasi wisata kuliner dan gencar dipromosikan di berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial. Kemunculan destinasi wisata baru yang muncul bernuansa *bottom-up* ini layak didukung, khususnya memberikan kemudahan perizinan dan regulasi yang pro bisnis.

Kebangkitan kembali pariwisata ini juga memberikan spirit baru bagi institusi pendidikan pariwisata untuk benar benar menghasilkan SDM atau lulusan yang dapat langsung diterjunkan dalam bisnis usaha pariwisata, baik di perhotelan, restoran maupun objek wisata serta usaha kerajinan.

Asosiasi pengusaha pariwisata

baik itu PHRI, ASITA, HPI serta asosiasi usaha pariwisata lainnya harus bergandengan tangan dan bersinergi untuk menghadirkan destinasi wisata unggul di semua daerah. Tentunya aksesibilitas dan dukungan transportasi harus siap dengan produk, layanan dan harga yang kompetitif.

Jangan sampai kesiapan destinasi wisata tersebut justru terkendala dengan harga paket wisata yang mahal lantaran beban harga tiket pesawat yang tinggi. Akibatnya, wisatawan mancanegara justru memblokir tujuan wisatanya ke negara tetangga seperti ke Malaysia, Thailand maupun Vietnam karena harga paket wisatanya lebih murah.

Marilah kita memasuki tahun 2023 dengan penuh optimisme dalam usaha pariwisata kendati dibawah bayang-bayang ancaman resesi. Diharapkan pariwisata bisa jadi lokomotif yang akan menarik sektor bisnis dan investasi dalam kerangka *tourism, trade, investment*. □d

*) **Ronny Sugiantoro MM CHE, wartawan SKH Kedaulatan Rakyat, Pengajar di Stipram**

Pojok KR

Pencurian laptop jaksa KPK banyak jeans-gangan.
-- PR bagi aparat untuk mengungkapkannya.

Pemkot segel kios Jalan Perwakilan.
-- Penerima setoran juga harus dilacak.

Pro kontra Perpu Ciptaker.
-- Pasti ada jalan keluar terbaik.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Terkesan dengan PT Pos

ZAMAN sekarang, mungkin banyak yang tidak lagi melihat bahkan anak-anak mungkin tidak mengenal PT Pos. Pengantar surat atau Pak Pos dengan dering lonceng sepedanya yang khas dan hingga tahun 90-an sangat idola bagi pelajar mahasiswa yang kos, kini tinggal kenangan. Padahal PT Pos sejatinya masih sangat banyak fungsi dan tugasnya. Namun gerusan zaman dan teknologi memang tidak pernah bisa dibayangkan. Hanya saja, akhir-akhir ini saya terkesan dengan PT Pos.

Karena ketika saya mendapat kiriman misal majalah dari komunitas saya yang dikirim pos, selalu sebelumnya mendapatkan info pesan via WhatsApp. Kalimat : *Sahabat Pos, Anda akan menerima kiriman dengan resi P23010400xxxxx. Info posindonesia.co.id/id/tracking/ho resi tersebut.*

Terus terang, informasi ini menggugah kenangan kembali akan kehadiran dan keberadaan PT Pos yang pernah berjaya pada masanya. Terimakasih PT Pos. □d

Lilis, Banguntapan Bantul

Masker dan PPKM yang Dicabut

AKHIR 2022, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut. Meski demikian Presiden Jokowi ketika menyatakan pencabutan itu tetap meminta masyarakat untuk waspada. Sehingga pemakaian masker di ruang tertutup dan keramaian tetap akan dilanjutkan.

Pencabutan ini cukup melegakan warga masyarakat. Namun ajakan simpatik untuk tetap waspada ini juga tetap memerlukan keteladanan elite.

Sehingga jangan sampai dalam acara yang tentu banyak orang artinya ada keramaian, ada pejabat pemerintah, tokoh masyarakat justru tidak mengenakan masker. Jika ini terjadi, maka warga pun akan tidak lagi waspada. Atau sampai kapan tingkat kewaspadaan harus dilaksanakan. Mungkin, kelak perlu ada penguaman 'kita bebas masker'. □d

Nunuk, Wates Tengah Kota Magelang

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung jawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsi.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP